

Analisis Pertanggungjawaban Perdata dan Tata Kelola Perusahaan dalam Sengketa Kepemilikan Saham Jawa Pos Group

Andi juliandi¹, Naufal Raid Mukhtar², Salvinus Aratw Maselaman Kelyaum³, Farahdinny Siswajanthi⁴, Dinalara D. Butar Butar⁵

Faculty Of Law, Pakuan University, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: Andijuliandi77@gmail.com, raidmukhtar2305@gmail.com, salvinuskelyaum3@gmail.com, farahdinny@unpak.ac.id, dinalara.dw@gmail.com

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 28 Januari 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 25 Juli 2026

ABSTRACT

This research is motivated by the share ownership dispute within the Jawa Pos Group, which reveals the complexity of legal relations between founders, shareholders, and media corporate management. This internal conflict triggers civil law uncertainty and potentially undermines the principles of good corporate governance in the national press industry. The purpose of this study is to analyze the validity of share ownership claims from a civil law perspective and its impact on corporate governance accountability. The research method used is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach, and case study. The results show that the share ownership dispute stems from administrative weaknesses in past corporate document recording and ambiguity in rights transfer agreements. This ambiguity triggers the civil liability of the board of directors for alleged mismanagement of corporate operational assets. On the other hand, this dispute weakens the implementation of transparency and accountability principles within the internal Jawa Pos Group, which ultimately threatens the independence of the press institution as a pillar of democracy. In conclusion, the resolution of share ownership disputes must be based on the fulfillment of formal corporate legality aspects in order to restore healthy corporate governance and ensure the sustainability of the press industry.

Keywords: Civil Liability, Corporate Governance, Share Dispute, Jawa Pos Group.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa kepemilikan saham dalam tubuh Jawa Pos Group yang mengungkap kompleksitas hubungan hukum antara pendiri, pemegang saham, dan manajemen korporasi media. Konflik internal ini memicu ketidakpastian hukum perdata dan berpotensi meruntuhkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada industri pers nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan klaim kepemilikan saham dari perspektif hukum perdata serta dampaknya terhadap pertanggungjawaban tata kelola korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa kepemilikan saham bersumber dari kelemahan administrasi pencatatan dokumen korporasi masa lalu dan ketidakjelasan perjanjian peralihan hak. Ketidakjelasan ini memicu pertanggungjawaban perdata direksi atas dugaan salah kelola aset operasional perusahaan.

Di sisi lain, sengketa ini melemahkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam internal Jawa Pos Group, yang pada akhirnya mengancam independensi institusi pers sebagai pilar demokrasi. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa kepemilikan saham harus didasarkan pada pemenuhan aspek legalitas formal korporasi demi memulihkan tata kelola perusahaan yang sehat dan menjamin keberlangsungan industri pers.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Tata Kelola Perusahaan, Sengketa Saham, Jawa Pos Group.

PENDAHULUAN

Perusahaan media pers memiliki karakteristik ganda yang unik, yaitu sebagai institusi bisnis komersial yang tunduk pada hukum perseroan terbatas dan sebagai lembaga sosial pilar demokrasi yang mengemban fungsi pemenuhan hak informasi publik. Konvergensi kedua fungsi ini menuntut penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara rigid demi menjaga independensi ruang redaksi dari intervensi modal. Namun, dinamika internal Jawa Pos Group yang diwarnai oleh sengketa kepemilikan saham antara pihak pendiri dan pemegang saham utama menguak rapuhnya aspek legalitas formal administrasi korporasi media di Indonesia. Sengketa ini tidak hanya memicu polemik mengenai keabsahan peralihan hak atas saham masa lalu, tetapi juga berdampak langsung pada keabsahan operasional bisnis dan gugatan pertanggungjawaban perdata direksi atas dugaan salah kelola aset perusahaan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kejelasan kepemilikan saham merupakan fondasi utama dalam menentukan struktur pertanggungjawaban yuridis. Konflik yang berlarut-larut dalam salah satu raksasa media cetak nasional ini memicu ketidakpastian iklim industri pers dan mengancam stabilitas internal perusahaan media dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya.

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut, masalah penelitian dalam artikel ini dirumuskan ke dalam dua fokus kajian utama, yaitu: pertama, bagaimana analisis hukum perdata terhadap keabsahan klaim kepemilikan saham dalam sengketa Jawa Pos Group ditinjau dari aspek legalitas formal korporasi? Kedua, bagaimana implikasi sengketa kepemilikan saham tersebut terhadap pertanggungjawaban perdata organ direksi dan implementasi tata kelola perusahaan media?

Untuk memetakan keaslian penelitian dan menjaga *state of the art*, dilakukan penelaahan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tematik. Penelitian oleh Kurniawan (2018) membedah sengketa saham perseroan secara umum dengan kesimpulan bahwa kelemahan pencatatan dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi pemicu utama gugatan perdata antar-pemilik modal. Selanjutnya, Lestari (2020) mengkaji tata kelola perusahaan media pers dengan menemukan bahwa intervensi pemilik saham yang terlalu dominan sering kali merusak independensi jurnalisme dan melanggar prinsip akuntabilitas korporasi. Di sisi lain, Nugroho dan Wijaya (2022) menganalisis doktrin pertanggungjawaban perdata direksi dalam hal terjadi kerugian perusahaan, di

mana direksi dapat digugat secara pribadi jika terbukti melakukan tindakan melampaui wewenang (*ultra vires*) selama sengketa internal berlangsung. Lebih lanjut, Setiawan (2023) menyoroti aspek perlindungan hak pekerja media yang kerap terabaikan ketika terjadi dualisme kepemimpinan akibat perebutan saham mayoritas di tubuh korporasi media pers. Terakhir, riset dari Utami (2024) menguraikan dinamika hukum bisnis mengenai pentingnya kejelasan klausul perjanjian peralihan hak (saham kuno) untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan di masa depan.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada sengketa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas dari aspek legalitas formal maupun pertanggungjawaban direksi. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara sengketa kepemilikan saham, pertanggungjawaban perdata organ perseroan, dan implementasi prinsip *good corporate governance* pada perusahaan media nasional masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menjadikan sengketa kepemilikan saham Jawa Pos Group sebagai studi kasus untuk menganalisis implikasi hukumnya terhadap tata kelola perusahaan media.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akar permasalahan legalitas sengketa saham Jawa Pos Group serta merumuskan pola pertanggungjawaban perdata yang ideal bagi organ perusahaan demi menyelamatkan tata kelola industri pers nasional. Artikel yang dikirimkan ini merupakan karya asli penulis yang bebas dari segala bentuk tindakan plagiarisme, belum pernah dipublikasikan di jurnal atau buku ilmiah lainnya, serta disusun secara patuh mengikuti format gaya selingkung yang telah ditetapkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang difokuskan pada metode studi kasus korporasi. Pendekatan normatif diterapkan untuk menelaah sinkronisasi regulasi perseroan terbatas, prinsip-prinsip *good corporate governance*, serta ketentuan hukum perdata terkait hak kepemilikan saham. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk membedah fakta-fakta hukum objektif seputar sengketa kepemilikan saham yang terjadi di dalam tubuh korporasi media. Lokasi penelitian difokuskan pada lingkungan internal administrasi hukum Jawa Pos Group serta Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri terkait yang memeriksa berkas sengketa tersebut. Kehadiran peneliti dalam riset ini bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) untuk mengumpulkan dokumen, menganalisis klausul perjanjian, dan menginterpretasikan data secara independen tanpa melakukan intervensi terhadap proses hukum maupun operasional perusahaan yang sedang berjalan. Subjek penelitian ini adalah sistem pertanggungjawaban perdata direksi dan mekanisme tata kelola perusahaan media pers dalam pusaran sengketa saham mayoritas. Informan (sasaran penelitian) dipilih secara selektif menggunakan teknik *purposive sampling* guna mendapatkan kedalaman informasi hukum yang akurat. Informan dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) orang Ahli Hukum

Perusahaan/Korporasi, 2 (dua) orang Praktisi Hukum (Advokat) Bisnis yang memahami anatomi sengketa perseroan, 2 (dua) orang perwakilan manajemen atau mantan pengurus korporasi media, serta 1 (satu) orang Ahli Hukum Pers/Dewan Pers untuk menilai implikasi sengketa terhadap independensi ruang redaksi. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui kombinasi wawancara mendalam (*in-depth interview*), studi dokumen, dan studi kepustakaan. Wawancara terstruktur dan semiterstruktur dilakukan dengan para informan untuk menggali perspektif doktrinal mengenai batas pertanggungjawaban perdata organ perseroan. Studi dokumen dilakukan secara intensif dengan menelaah Akta Pendirian Perseroan, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Buku Daftar Pemegang Saham Jawa Pos Group, serta berkas gugatan atau putusan pengadilan yang relevan dengan kasus yang diteliti. Mengingat penelitian ini sangat bergantung pada kekuatan argumentasi teoretis hukum dagang, peneliti melakukan penelaahan literatur kepustakaan secara rigid. Peneliti membatasi dan menyeleksi jumlah literatur kepustakaan sekurang-kurangnya 25 artikel jurnal ilmiah relevan yang diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2016–2026). Standar pemilihan literatur sebagai objek kajian ditentukan berdasarkan reputasi akademik yang ketat, yaitu hanya menggunakan jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2 atau SINTA 1 di bidang hukum bisnis dan tata kelola perusahaan, serta jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau Web of Science dengan topik *corporate governance* dan *media law*. Langkah seleksi ini bertujuan untuk memastikan aktualitas regulasi dan keabsahan teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis. Teknis analisis data penelitian menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan alur interaktif. Tahapan analisis data meliputi tiga rangkaian kegiatan yang simultan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Pertama, reduksi data dilakukan dengan menyaring, mengategorikan, dan memfokuskan data mentah hasil wawancara serta dokumen akta perusahaan yang berkaitan langsung dengan sengketa kepemilikan saham. Kedua, penyajian data dilakukan secara naratif, logis, dan sistematis ke dalam dua klaster pembahasan, yaitu validitas kepemilikan saham dari sudut pandang hukum perdata dan dampak operasional terhadap tata kelola perusahaan media. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dengan menguji data yang telah disajikan menggunakan teori pertanggungjawaban korporasi dan asas-asas *good corporate governance* guna menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang orisinal dan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa kepemilikan saham di dalam tubuh Jawa Pos Group merupakan produk dari ketidakjelasan administrasi korporasi masa lalu dan tidak sinkronnya implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan hukum perdata materiil. Berdasarkan studi dokumen terhadap akta perubahan perseroan dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari tahun 1980-an hingga awal 2000-an, ditemukan

adanya praktik "saham atas nama" atau *nominee arrangement* tidak resmi serta kesepakatan lisan terkait hibah saham yang tidak dituangkan dalam akta otentik Notaris. Ketidakpatuhan administratif ini menyebabkan Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan tidak mencerminkan realitas kepemilikan saham yang sesungguhnya secara mutakhir, sehingga memicu dualisme klaim antara pihak pendiri awal dan pemegang saham korporasi saat ini.

Untuk memetakan titik-titik krusial sengketa hukum dan dampaknya terhadap operasional korporasi media pers berdasarkan hasil telaah dokumen hukum dan wawancara dengan ahli korporasi, temuan disajikan secara ringkas pada tabel berikut:

Tabel 1: Titik Sengketa Yuridis dan Dampak Tata Kelola pada Jawa Pos Group

Aspek Hukum Perdata	Akar Permasalahan / Temuan Dokumen	Implikasi terhadap Tata Kelola Perusahaan
Legalitas Saham	Ketiadaan akta otentik hibah/peralihan saham kuno	Ketidakpastian hak suara dalam RUPS dan pembagian dividen
Akuntabilitas Organ	Dugaan tindakan <i>ultra vires</i> direksi tanpa persetujuan RUPS	Munculnya gugatan pertanggungjawaban perdata pribadi direksi
Transparansi Pers	Tertutupnya akses informasi keuangan internal perseroan	Melemahnya kepercayaan publik dan independensi ruang redaksi

Data lapangan dalam Tabel 1 menegaskan bahwa sengketa kepemilikan saham berdampak langsung pada kelumpuhan fungsi organ perseroan. Hasil wawancara mendalam dengan ahli hukum perusahaan mengungkapkan bahwa ketika legalitas kepemilikan saham mayoritas menjadi status *sengketa (sub-judice)*, legalitas penunjukan direksi baru dan keputusan RUPS berikutnya ikut cacat hukum secara keperdataan. Kondisi ini memicu gugatan pertanggungjawaban perdata pribadi (*piercing the corporate veil*) terhadap organ direksi yang dianggap melakukan tindakan sepihak (*ultra vires*) atas pemanfaatan aset operasional perusahaan media tanpa persetujuan pemegang saham yang sah.

Analisis data lebih lanjut membuktikan bahwa sengketa ini merusak pilar utama *good corporate governance*, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sesuai hasil observasi terhadap dokumen sengketa, benturan kepentingan (*conflict of interest*) antar-pemilik modal menyebabkan laporan keuangan tahunan perseroan tidak dapat disahkan tepat waktu. Mengacu pada pandangan Harahap (2018), ketidakjelasan Daftar Pemegang Saham secara otomatis menggugurkan hak mutlak seseorang untuk bertindak atas nama perseroan. Dalam konteks industri pers, kondisi vakum ini sangat berbahaya karena memicu instabilitas manajerial yang berdampak pada kesejahteraan jurnalis serta menurunkan kredibilitas perseroan sebagai institusi pers yang wajib independen dan akuntabel di hadapan publik.

Bagian diskusi menjelaskan temuan ini secara logis dengan mengaitkannya pada sumber hukum perdata yang relevan. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa bukti kepemilikan saham didasarkan pada pencatatan dalam Buku Daftar Pemegang Saham. Pengabaian terhadap legalitas formal ini demi alasan "kepercayaan kekeluargaan" di masa lalu menjadi bumerang bagi korporasi media modern. Sengketa Jawa Pos Group menjadi bukti empiris bahwa dalam hukum korporasi, aspek hukum perdata materiil mengenai pembuktian tertulis mengalahkan segala bentuk perjanjian lisan, terlepas dari seberapa besar kontribusi historis seorang pendiri terhadap kemajuan perusahaan tersebut.

Guna mengatasi implikasi buruk bagi industri pers secara luas, solusi hukum yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pentingnya penerapan pemisahan yang tegas antara kepemilikan saham komersial (*business ownership*) dan kebijakan ruang redaksi (*editorial independence*). Melalui mekanisme *trust fund* atau yayasan karyawan sebagaimana diterapkan di beberapa media pers global, hak suara dan pembagian dividen dapat dikelola secara institusional, sehingga sengketa personal antar-pemilik modal tidak akan mengganggu fungsi utama perusahaan pers sebagai instrumen pemenuhan informasi publik. Rekonstruksi ini sangat mendesak demi memulihkan tata kelola yang sehat dan menjamin keberlangsungan iklim bisnis media di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa kepemilikan saham dalam tubuh Jawa Pos Group merupakan akibat dari tidak terpenuhinya aspek legalitas formal administrasi korporasi di masa lalu, yang diperparah oleh kegagalan implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance*. Secara konseptual, ketiadaan akta otentik peralihan hak dan pengabaian pemutakhiran Buku Daftar Pemegang Saham telah menciptakan celah hukum yang memicu dualisme klaim kepemilikan serta tuduhan tindakan *ultra vires* yang berujung pada ancaman pertanggungjawaban perdata pribadi bagi organ direksi. Dampak sengketa ini tidak hanya melumpuhkan fungsi manajerial internal perseroan akibat benturan kepentingan, melainkan juga mengancam pilar transparansi, akuntabilitas, dan independensi ruang redaksi korporasi media pers. Guna menjawab tujuan utama penelitian, penulis memberikan rekomendasi bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan wajib didasarkan pada pemenuhan aspek hukum perdata tertulis secara rigid. Selain itu, industri pers konglomerasi di Indonesia harus mengadopsi mekanisme pemisahan yang tegas antara kepemilikan saham bisnis dan kebijakan redaksi melalui instrumen hukum yang independen demi melindungi fungsi pers sebagai instrumen publik. Kajian dalam penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis doktrinal hukum perdata dan tata kelola internal perseroan terbatas konvensional pada satu studi kasus konglomerasi media cetak. Oleh karena itu, penulis menyarankan bagi penelitian yang relevan di masa depan untuk memperluas lokus kajian pada dinamika tata kelola korporasi media digital (*digital media startup*) di Indonesia yang memiliki

karakteristik struktur modal ventura dan skema kepemilikan saham opsi karyawan (*Employee Stock Ownership Program*). Riset masa depan perlu mengeksplorasi bagaimana potensi sengketa kepemilikan modal dalam ekosistem digital tersebut dapat dimitigasi secara preventif melalui penyusunan *shareholders agreement* yang adaptif, guna memberikan kontribusi teoretis baru bagi perkembangan hukum bisnis dan hukum media di era konvergensi teknologi.

DAFTAR RUJUKAN

- Kurniawan, I. (2018). Kepastian Hukum Pencatatan Saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Dagang dan Investasi*, 14(2), 112-126.
- Lestari, P. (2020). Intervensi Pemilik Modal terhadap Independensi Redaksi Media Massa ditinjau dari Prinsip Good Corporate Governance. *Jurnal Komunikasi dan Akuntabilitas Korporasi*, 7(1), 45-58.
- Nugroho, A., & Wijaya, H. (2022). Tanggung Jawab Pribadi Direksi atas Tindakan Ultra Vires yang Merugikan Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis Lex Renaissance*, 17(3), 204-218.
- Prasetyo, B. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Sengketa Kepemilikan Korporasi. *Jurnal Adjudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 155-169.
- Saputra, D. (2019). Keabsahan Hukum Perjanjian Nominee Saham dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 382-395.
- Setiawan, R. (2023). Dampak Dualisme Kepemimpinan Perusahaan Media terhadap Kepastian Hak Normatif Pekerja Pers. *Jurnal Hukum Kerja Keadilan*, 11(2), 87-101.
- Suryono, T. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Aset Perusahaan Pers Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Mimbar Hukum*, 37(1), 12-26.
- Utami, S. (2024). Analisis Yuridis Peralihan Hak Atas Saham Kuno yang Tidak Memiliki Akta Otentik Notaris. *Jurnal Kertha Patrika*, 46(1), 74-89.
- Harahap, M. Y. (2018). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Ed. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2019). *Good Corporate Governance di Indonesia: Penerapan dan Implementasi Hukum* (Ed. 2). Jakarta: PT Sinar Grafika.